



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 992.742.189.156,00 bertambah sebesar Rp. 320.279.312.044,00 sehingga menjadi Rp. 1.313.021.501.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:	
a. Semula	Rp. 916.511.771.318,00
b. Bertambah	<u>Rp. 182.907.879.572,55</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.099.419.650.890,55
2. Belanja Daerah:	
a. Semula	Rp. 992.742.189.156,00
b. Bertambah	<u>Rp. 320.279.312.044,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.313.021.501.200,00
Jumlah Defisit setelah perubahan	(Rp. 213.601.850.309,45)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan:	
1) Semula	Rp. 81.230.417.838,00
2) Bertambah	<u>Rp. 137.371.432.471,45</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 218.601.850.309,45
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 213.601.850.309,45
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula	Rp. 91.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 30.943.009.300,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 122.443.009.300,00

 - b. Dana Perimbangan:

1) Semula	Rp. 579.130.091.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 172.296.006.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 751.426.097.000,00

 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

1) Semula	Rp. 245.881.680.318,00
2) Berkurang	<u>Rp. 20.331.135.727,45</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 225.550.544.590,55
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp. 7.450.186.780,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.621.500.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 9.071.686.780,00

 - b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp. 8.209.867.700,00
2) Berkurang	<u>Rp. 153.470.550,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 8.056.397.150,00

 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp. 12.672.500.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 5.172.500.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 7.500.000.000,00

 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

1) Semula	Rp. 63.167.445.520,00
2) Bertambah	<u>Rp. 34.647.479.850,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 97.814.925.370,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak:

1) Semula	Rp. 86.807.503.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 86.807.503.000,00

b. Dana Alokasi Umum:		
1) Semula	Rp.	492.322.588.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>8.648.525.000,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	483.674.063.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>180.944.531.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	180.944.531.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>300.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	5.300.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:		
1) Semula	Rp.	45.018.462.900,00
2) Bertambah	Rp.	<u>6.111.467.690,55</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan	Rp.	51.129.930.590,55
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:		
1) Semula	Rp.	161.620.614.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	161.620.614.000,00
d. Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil SDA Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Dana Insentif Daerah:		
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000,00
f. Kurang Bayar Dana Perimbangan:		
1) Semula	Rp.	26.742.603.418,00
2) Berkurang	Rp.	26.742.603.418,00
Jumlah kurang bayar dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp. 615.736.384.700,00
2) Bertambah	<u>Rp. 111.518.555.782,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 727.254.940.482,00

 - b. Belanja Langsung:

1) Semula	Rp. 377.005.804.456,00
2) Bertambah	<u>Rp. 208.760.756.262,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 585.766.560.718,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:

1) Semula	Rp. 387.094.814.705,00
2) Bertambah	<u>Rp. 95.808.287.302,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 482.903.102.007,00

 - b. Belanja Hibah:

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.990.100.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 13.990.100.000,00

 - c. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula	Rp. 3.825.100.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.660.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.485.100.000,00

 - d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes:

1) Semula	Rp. 1.569.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp. 1.569.000.000,00

 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes:

1) Semula	Rp. 220.247.469.995,00
3) Bertambah	<u>Rp. 60.168.480,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp. 220.307.638.475,00

 - f. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:	
1) Semula	Rp. 32.589.102.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.082.115.400,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 35.671.217.400,00
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1) Semula	Rp. 238.238.031.046,00
2) Bertambah	<u>Rp. 85.497.968.862,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 323.735.999.908,00
c. Belanja Modal:	
1) Semula	Rp. 106.178.671.410,00
2) Bertambah	<u>Rp. 120.180.672.000,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 226.359.343.410,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:	
1) Semula	Rp. 81.230.417.838,00
2) Bertambah	<u>Rp. 137.371.432.471,45</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 218.601.850.309,45
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):	
1) Semula	Rp. 81.230.417.838,00
2) Bertambah	<u>Rp. 137.371.432.471,45</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp. 218.601.850.309,45
b. Pencairan Dana Cadangan:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 18 September 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN (9,128/2017)



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003